

Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Konsep *Sustainable Development* Terhadap Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara

Mulyadi¹, Anisa Almagfira², Amanda Cherlyta Apriliani Nasution³, Ghefira Nur Fatimah⁴, Azzhara Nikita Wahdah⁵, Daffa Charisma Putra Ramadhon⁶, Haykal Rizki Alvito⁷, Surya Insani Kamil⁸, Joy Catherine Carina Tambunan⁹, Annisa¹⁰

¹⁻¹⁰Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email Korespondensi: mulyadi@upnvj.co.id

Abstract:

The relocation of the National Capital is a national strategic project to create a sustainable city that attracts investment from both within the country and abroad. Public participation is community involvement in the decision-making process and policy determination. This research uses quantitative research methods whose focus is collecting scientific data and references to answer the problem formulation in the introduction. From this research, the results obtained are (1) Community participation is important in every phase of development, implementation, impact evaluation and conceptualization to ensure success; (2) The government's steps in ensuring the participation of the Indonesian people in the concept of sustainable development in developing IKN can use the SDGs pillars.

Abstrak:

Pemindahan Ibu Kota Negara adalah proyek strategis nasional untuk menciptakan kota berkelanjutan yang menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Partisipasi publik merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang fokusnya adalah mengumpulkan data dan referensi secara ilmiah untuk menjawab rumusan masalah dalam pendahuluan. Dari penelitian ini diperoleh hasil yaitu (1)Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam setiap fase pengembangan, implementasi, evaluasi dampak, dan konseptualisasi untuk memastikan keberhasilan; (2)Langkah Pemerintah dalam menjamin keikutsertaan masyarakat Indonesia dalam konsep sustainable development dalam pembangunan IKN dapat menggunakan pilar - pilar SDGs.

Article History

Received May 25, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 05 2024

Available online 15 June, 2024

Keywords:

Community Participation, Sustainable Development, Capital City.

Kata Kunci :

Partisipasi Publik, Pembangunan, Ibu Kota.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11905462>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Kalimantan Timur, yang akan dikenal sebagai "Nusantara", secara resmi akan menjadi lokasi baru Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia, menggantikan DKI Jakarta. Pemindahan ibu kota Indonesia ini telah menuai banyak perbincangan publik. Banyak pihak yang pro dan kontra terkait pemindahan IKN, mulai dari pemilihan lokasi IKN hingga pengesahan RUU yang dinilai tergesa-gesa.

Provinsi DKI Jakarta berfungsi sebagai pusat politik dan ekonomi. dengan terus meningkatnya jumlah orang yang pindah ke sini dan tinggal untuk sementara waktu. Kemampuan perencanaan kota dan lingkungan tidak dapat diimbangi dengan hal ini. Karena adanya isu-isu baru, Pemerintah Republik Indonesia memilih untuk memindahkan pusat pemerintahan, salah satunya DKI Jakarta.

1. Kondisi obyektif Jakarta sudah tidak sesuai lagi untuk sebuah IKN. Hal ini terlihat dari "beban" yang harus ditanggung oleh Jakarta, antara lain.

¹Email: anisalmagfira321@gmail.com, amandacherlyta@gmail.com, gghefira9@gmail.com, nikitaazhra4@gmail.com, charismadaffa@gmail.com, haykalrizki.alvito@gmail.com, joytambunan2308@gmail.com, nisaani614@gmail.com, surya.kamil09@gmail.com¹⁰

2. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, populasi Pulau Jawa mencapai 151,59 juta jiwa pada tahun 2020, atau sekitar 56,10 persen dari total populasi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa menanggung sebagian besar beban demografis Indonesia.
3. Kontribusi ekonomi Jawa dalam bentuk PDB pada tahun 2021 mencapai 57,89 persen dari PDB nasional senilai Rp16.970,8 triliun, dengan PDB per kapita Rp 62,2 juta atau USD 4.349,5 Mayoritas PDB Jawa berasal dari Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) sebesar 20,85 persen, dengan PDB per kapita DKI Jakarta Rp274,7 juta, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional Rp 62,2 juta
4. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari tahun 2016 menunjukkan bahwa Pulau Jawa juga mengalami kekurangan air bersih.
5. Karena potensi dan sensitivitas lingkungan Jakarta, telah terjadi peningkatan urbanisasi yang signifikan di pulau Jawa, terutama di daerah penyangga di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur, di mana terdapat sekitar 32 juta penduduk, termasuk banjir, longsor, abrasi air laut, polusi sungai, dan kemacetan lalu lintas.²

Kedua, IKN perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif, terutama di Kawasan Timur Indonesia. Selama ini, segala sesuatu dikatakan berpusat di Jakarta dan sekitarnya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya, dan lain-lain). Tidaklah mengherankan jika 70 persen lahan, atau 664,01 km², dari total wilayah geografis Indonesia seluas 1.919.440 km², tercakup dalam perputaran uang di Jakarta. Saat ini, jumlah penduduk Jakarta mencapai 10,56 juta jiwa, atau 3,9% dari total 279,22 juta penduduk Indonesia. Ketidaksetaraan dalam pembangunan dan kesejahteraan merupakan hasil dari hal ini di Indonesia.

Pembangunan adalah proses membuat perubahan atau perbaikan untuk kepentingan negara. Pulau Jawa dan Jakarta menjadi pusat pembangunan. Situasi ini merugikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan akan berkelanjutan karena kurang memanfaatkan potensi daerah, merusak keadilan regional, dan menempatkan negara ini pada risiko perpecahan. Telah diketahui bahwa pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kebutuhan generasi sekarang atau yang akan datang dalam Laporan Brundlant dari tahun 1987.

Gagasan pembangunan berkelanjutan telah diakui secara luas, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memasukkannya ke dalam berbagai deklarasi, resolusi, dan konvensi. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya juga harus dipertimbangkan, terutama di tempat-tempat yang terkena dampak pembangunan. Pemindahan Ibu Kota Negara secara resmi dimulai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Meskipun demikian, pemindahan ibu kota telah dibahas oleh pemerintahan sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 awalnya diperkenalkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019. Salah satu aspek dari gagasan tersebut adalah pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dikenal sebagai partisipasi publik. Komponen fundamental lain dari administrasi yang demokratis adalah keterlibatan publik. Sistem politik demokratis Republik Indonesia mengharuskan adanya wadah yang sangat baik untuk keterlibatan publik. Partisipasi publik diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif, yang merupakan aspek lain dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam hal perencanaan kota. Hal ini memungkinkan untuk membuat keputusan dan perencanaan kota menjadi lebih inklusif dengan menyediakan forum bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam proses penentuan perencanaan tata ruang. Hal ini merupakan tanda bahwa tujuan kota untuk pembangunan berkelanjutan telah tercapai. Dietz dan Stern (2008) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi dan kualitas kebijakan dengan mencapai tujuan membangun kota yang inklusif. Hal ini dapat berkontribusi

² Suryadi Jaya Purnama., Chotib (2022) Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(2), 155 - 168 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/viewFile/3486/1100>

pada kualitas lingkungan yang lebih baik. Gagasan kota layak huni mencakup keterlibatan publik serta penyediaan ruang untuk melaksanakan hak-hak penduduk untuk bebas berbicara dan menentukan nasib sendiri atas lingkungan tempat tinggal mereka.

Karena gagasan negara demokratis yang dijalankan oleh dan untuk rakyat merupakan landasan untuk menciptakan konsensus nasional, memaksimalkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengalihan IKN menjadi lebih penting daripada konsultasi kelembagaan. Mengabaikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah di kemudian hari. Karena sifat masyarakat saat ini yang canggih dan penuh tuntutan, masalah hanya akan semakin rumit. Kritik mereka terhadap kebijakan pemerintah akan semakin meningkat.

Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan telah mengakibatkan timbulnya berbagai masalah dalam perencanaan tata ruang. Kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta kesesuaian perencanaan tata ruang untuk pembangunan kota di masa depan, merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi keterlibatan masyarakat. Selain keterlibatan masyarakat, ambisi pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur tidak dapat diwujudkan hanya dengan mengadakan sayembara desain. Selain itu, pemerintah harus menyusun rencana untuk menggabungkan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang Pulau Kalimantan, dan rencana tata ruang wilayah Kalimantan Timur. Hal ini berkaitan dengan memastikan medan yang cocok untuk pengangkutan.

Menjadikan ibu kota negara sebagai kota yang berkelanjutan, yang berarti menciptakan dan melestarikan lingkungan perkotaan dengan penekanan pada kesejahteraan sosial, efisiensi sumber daya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan, merupakan salah satu caranya. Tulisan ini akan membahas beberapa rumusan masalah, dengan fokus pada latar belakang informasi penulis. Secara khusus, apa saja indikator yang menunjukkan kemajuan Ibu Kota Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kesebelas? Apa peran ibu kota negara dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia?

METODE

Dalam artikel ilmiah ini lebih berfokus kepada metode penelitian kualitatif yang dimana dalam metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data serta referensi untuk melengkapi instrumen-instrumen jawaban dalam memecahkan rumusan masalah dalam pendahuluan dengan tujuan sebuah output atau hasil penelitian yang dapat didiskusikan oleh peneliti dan pembaca, dibuktikan secara ilmiah oleh penguji dan pembaca, serta dikembangkan oleh para penulis artikel ilmiah lain agar dapat berkembangnya suatu ilmu pengetahuan.

Metode penelitian kualitatif sendiri pada dasarnya berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang dimana peneliti sebagai kunci serta lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam hal ini posisi seorang peneliti menempatkan sebagai instrumen kunci dalam jalannya penelitian. Yang dimana teknik pengumpulan data pada artikel ilmiah ini bersifat narasi dan dalam penelitian ini biasanya hasilnya bersifat objektif.³

Pada artikel ilmiah ini kami berfokus kepada teknik pengumpulan data studi literatur yang dimana dalam teknik pengumpulan data studi literatur serta teknik pengumpulan data focus group discussion. Metode studi literatur adalah seperangkat prosedur yang berhubungan dengan cara mengumpulkan informasi dari perpustakaan, membaca dan membuat catatan, serta menangani bahan penelitian (Zed, 2008:3). Dimana dalam hal ini kami mencari bahan penelitian kami melalui sumber tertulis baik dari jurnal, website, serta buku baik secara otentik maupun elektrik. Sementara FGD sendiri merupakan metode wawancara kepada narasumber. Dimana di dalam wawancara tersebut terdapat diskusi

³ Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung : PT Penerbit Alfabeta Bandung
https://www.academia.edu/44502098/Prof_dr_sugiyono_metode_penelitian_kuantitatif_kualitatif_dan_r_and_d_intro_PDFDrive_1

yang lebih diaktifkan sehingga membentuk sebuah kelompok wawancara yang tidak dimiliki oleh metode riset kualitatif yang lain (Sang Gede Purnama, 2015). Sehingga kami mempertimbangkan bahwa kedua metode penelitian sesuai dengan tema yang akan dibahas pada kelompok kami. Dimana kiranya lokasi objek penelitian tersebut jauh dari lokasi kami.

Pada metode penelitian artikel kelompok kami sekiranya kami akan berfokus kepada metode penelitian kualitatif. Dimana dalam artikel ilmiah kelompok kami objek pengamatan milik kami yaitu Ibukota Negara. Fokus artikel ilmiah kami ialah lebih kepada pengkajian serta uji analisis partisipasi sosial masyarakat terhadap *sustainable developer* Ibukota Nusantara. Dimana dalam hal ini kami kami berfokus terhadap analisis dari partisipasi masyarakat tersebut terhadap sustainable development ibukota nusantara.

Dalam hal analisis masyarakat sendiri berfokus kepada analisis secara tidak langsung yang dilakukan oleh kelompok kami dikarenakan keterbatasan jarak. Analisis partisipasi sosial tersebut dapat diperoleh dari data-data jurnal ilmiah atau karya tulis lain yang bersinggungan dengan tema ini. Disamping itu topik tersebut juga sedang naik daun dikarenakan wacana pemindahan ibukota negara yang semakin dekat. Disamping itu dalam hal konsep *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan menjadi fokus dalam kajian kami. Yang dimana dalam hal ini apakah ibu kota nusantara bisa menjawab sesuai persepsi kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan sebagai penyedia dan penyangga masyarakat dan negara. Sehingga konsep Ibukota Nusantara dalam hal perencanaan pembangunan memang teruji dengan baik. Sehingga dalam hal ini Indonesia sukses menyusun ibukota nusantara yang sesuai dengan tantangan zaman yang panjang.

Pada hal ini metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dapat membantu kami dalam mencari bahan dan kajian dalam hasil penelitian dari artikel kelompok kami. Dikarenakan banyaknya sumber-sumber penelitian yang bisa kami dapatkan dari Google Scholar, jurnal ilmiah, maupun referensi yang lainnya cukup untuk menyediakan bahan dan kajian bagi kelompok kami. Disamping itu sumber-sumber tersebut juga banyak dan cocok dengan penelitian kami yang menggunakan analisis dalam mengkaji masyarakat terhadap *sustainable development* ibukota nusantara.

Pembahasan *sustainable development* sendiri atau keberlanjutan pembangunan juga menjadi alasan kami dalam memilih teknik studi pustaka dikarenakan kami bisa mengkaji terkait hal tersebut yang sesuai dengan tantangan ikn ke depannya. Sehingga pengertian serta kajian *sustainable development* yang terkait dengan artikel ilmiah bisa sesuai dengan kebutuhan ibukota negara di masa sekarang dan nanti. Disamping itu, *forum group discussion* juga penting dalam menyamakan persepsi antar anggota kelompok yang lain. Sehingga diharapkan setiap anggota dapat memahami poin-poin pembahasan serta substansi yang dibahas dalam kerja kelompok ini. Maka dari itu forum group discussion tidak dapat diremehkan serta merupakan salah satu indikator penting dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Oleh karena dalam judul artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan dan *forum group discussion* sebagai metode penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan IKN

Nama resmi ibu kota baru Indonesia yang akan menggantikan Jakarta adalah Ibu Kota Nusantara (IKN). Ibu kota Negara Republik Indonesia akan menjadi lokasi resmi IKN sehingga menjadi satu kesatuan pemerintahan daerah setingkat provinsi yang diawasi oleh Otoritas IKN. IKN, ibu kota negara, akan menjadi tuan rumah acara yang melibatkan pemerintah pusat, pejabat asing, dan perwakilan lembaga dan organisasi internasional. IKN diharapkan dapat berkembang menjadi kota metropolis global yang berkelanjutan, simbol identitas nasional, dan mesin perekonomian.⁴ Pencapaian tujuan IKN akan

⁴ Faustina, R., Bayu Dwi Putri, A., Batari, C., Putri, K., Nur Juniarsih, S., & Miradhia, D. (2023). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA (IKN). *Journal of Urban and Regional Planning*, 15(2), 23-35.

melibatkan berbagai faktor, antara lain strategi pembangunan daerah, pembangunan ekonomi dan sosial, sumber daya manusia, lahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, infrastruktur, transmisi, pemeliharaan, dan keamanan.

Di Indonesia, peran masyarakat sangat penting dalam pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Ibu Kota Negara (IKN). Berdasarkan hasil kajian, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan IKN Nusantara yang merupakan cikal bakal pembangunan, pemerataan, dan pemberdayaan Provinsi Bagian Timur Indonesia.⁵ Pembentukan IKN diharapkan dapat memacu berkembangnya pusat-pusat perekonomian baru di Daerah Pedalaman dan Pulau Kalimantan. Keterlibatan dan fungsi masyarakat lokal sebagai pemain utama dalam pembangunan merupakan salah satu tanda keberhasilan dalam hal ini.

Pada proses pembangunan IKN diperlukan perencanaan yang matang untuk merancang strategi komunikasi pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat pesisir dan pemangku kepentingan terkait.⁶ Sumber daya alam di darat, seperti hutan, mineral, dan bahan tambang, serta lahan pertanian yang baik, semakin berkurang ketersediaannya seiring dengan meningkatnya kebutuhan penduduk. Diperkirakan populasi Indonesia akan terus meningkat, mencapai 267 juta jiwa pada tahun 2015. Oleh karena itu, untuk menghindari timbulnya masalah, kami akan, maka relokasi IKN ke Kalimantan Timur harus direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Indonesia akan dapat mencapai IKN yang “Cerdas, Hijau, Indah, dan Berkelanjutan” dengan bantuan pemahaman yang menyeluruh terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.⁷ Diperlukan perencanaan yang matang dan pemahaman terhadap faktor sosial budaya dan sosial ekonomi untuk merelokasi IKN ke Kalimantan Timur. Komponen perencanaan sosial dilaksanakan melalui unsur penjaminan seperti mendorong penerimaan masyarakat, meningkatkan standar sumber daya manusia, memanfaatkan dan memperluas pengetahuan lokal, membangun sumber pendapatan lokal, dan mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan-termasuk generasi milenial-dalam pembentukan IKN.

Terwujudnya IKN yang harmonis dan pluralistik yang selaras dengan jati diri bangsa Indonesia memerlukan pemahaman dan penyusunan strategi yang matang terhadap faktor sosial budaya dan sosial ekonomi. Elemen-elemen jaminan seperti penerimaan masyarakat, peningkatan standar sumber daya manusia, pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal, sumber mata pencaharian masyarakat, dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan-termasuk generasi milenial-dalam pengembangan IKN merupakan bentuk implementasi dari komponen perencanaan sosial.⁸ Dengan memberikan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan melibatkan mereka sebagai pekerja, pemerintah mengikutsertakan masyarakat setempat dalam pertumbuhan IKN. Misalnya, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan ruang kerja kepada warga pengelola Perumahan Pekerja Konstruksi (HPK). Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Bank BNI atau PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk mengelola sampah yang ada di kawasan HPK IKN agar sampah-sampah yang sudah ada dapat didaur ulang dan dipilah. Salah satu komponen penting dalam pengembangan IKN adalah pelestarian lingkungan hidup. Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU Nomor 3 Tahun 2022) dan berbagai undang-undang perlindungan lingkungan hidup lainnya telah dikeluarkan

https://www.researchgate.net/publication/371575487_PARTISIPASI_MASYARAKAT_DALAM_PERENCANAAN_PEMBANGUNAN_IBU_KOTA_NEGARA_IKN

⁵ Reshinta, E. F., Suchyanto, O. S., & Hardi, O. S. (2023). Kapasitas Jalan untuk Jalan Alternatif di Persimpangan Joglo Raya, Jakarta Barat. *Jurnal Perencanaan Wilayah & Kota*, 18(2), 1-10. <https://doi.org/10.29313/jpwk.v18i2.2585>

⁶ Wargadinata, E. L. (2021). Hubungan dan peran pemangku kepentingan program SMART-Kampung Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 47-64. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1449>

⁷ Fristikawati, Y., Alvander, R., & Wibowo, V. (2022). Pengaturan dan penerapan sustainable development pada pembangunan ibukota negara Nusantara. *Jurnal Pembangunan*, 5(2), 739. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51859/22910>

⁸ Saraswati, M. K., & Adi, E. A. W. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(2), 40-42. doi: 10.36312/jisip.v6i1.3086/[http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index\[1\]](http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index[1])

pemerintah.⁹ Secara hukum, pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari perlindungan lingkungan hidup, yang juga mencakup pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum, termasuk pengelolaan limbah. Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan IKN sangat penting bagi keberhasilan proyek serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

Penggunaan teknologi yang tepat harus membantu meningkatkan keberlanjutan dan memperkuat masyarakat. Peran masyarakat dalam proses pengembangan, pengimplementasian, evaluasi dampak, dan konseptualisasi adalah penting untuk menjamin keberhasilan. Pengembangan teknologi harus mengingatkan pengetahuan lokal sebagai komponen dari Sistem Pengetahuan Adat (*Indigenous Knowledge Systems/IKS*), serta memperhatikan konteks sosial budaya. Kata lainnya, penggunaan teknologi yang tepat harus mendorong keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

Peran masyarakat dalam setiap tahap proses pengembangan, pengimplementasian, evaluasi dampak, dan konseptualisasi adalah wajib untuk menjamin keberhasilan. Pengembangan teknologi harus mengingatkan pengetahuan lokal sebagai komponen dari Sistem Pengetahuan Adat (*Indigenous Knowledge Systems/IKS*), serta memperhatikan konteks sosial budaya. IKS berevolusi sebelum penjajahan, dan sistem pengetahuan ilmiah modern (MSKS) terinspirasi oleh pendidikan "barat". IKS berasal dari Tiongkok kuno, India, dan Afrika, dan sekarang sudah sangat umum. IKS mencakup berbagai masalah sehari-hari, termasuk air, kesehatan, pertanian, pengolahan makanan, dan pelestarian. IKS adalah sumber daya intelektual yang spesifik untuk konteks tertentu dan harus diintegrasikan langsung ke dalam identifikasi dan evaluasi.¹⁰

Perencanaan, pengelolaan, dan pembangunan berkelanjutan seringkali membutuhkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pelestarian lanskap yang berharga. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak isu lanskap yang melampaui batas-batas lokal dan sering kali membutuhkan kolaborasi dan pengembangan yang terkoordinasi di antara berbagai pemangku kepentingan. Karena mereka memiliki pemahaman yang unik mengenai budaya dan adat istiadat setempat, para pemangku kepentingan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga lanskap "budaya".¹¹ Pengelolaan fitur-fitur lanskap tertentu, seperti hutan rakyat, wisata alam, dan pengembangan lanskap pariwisata berkelanjutan, juga sangat dipengaruhi oleh penduduk setempat dan masyarakat yang berkepentingan.

Mempertahankan lanskap berkelanjutan juga harus mempertimbangkan pendanaan dan kerangka kerja kebijakan. Meskipun situasi yang lebih terfokus dapat memperoleh manfaat dari pendekatan partisipatif, pengelolaan formal kawasan lindung yang cukup luas tetap perlu dilakukan. Skenario-skenario yang disebutkan di atas menunjukkan bagaimana partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pembangunan berkelanjutan seringkali diperlukan untuk melestarikan lanskap-lanskap yang berharga.¹² Inisiatif berbasis masyarakat tidak mungkin menggantikan pengelolaan formal, namun pendekatan partisipatif dapat menjadi efektif dalam situasi yang lebih tepat sasaran.

Langkah pemerintah dalam menjamin keikutsertaan masyarakat dalam konsep sustainable development IKN

Di banyak negara, kata yang paling penting dalam pemerintahan adalah pembangunan. Bahkan bisa dikatakan bahwa frasa ini telah berevolusi menjadi sinonim dengan eksistensi suatu negara. Frasa

⁹ Sembiring, F. Y., Siar, L., & Pinori, J. J. (2023). Analisis yuridis terhadap pembentukan undang-undang nomor tahun 2022 tentang ibu kota negara. Vol.XI/No.4/Apr/2023 Hal. 747-749 . <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47766>

¹⁰ John Tharakan (2015) Integrating indigenous knowledge into appropriate technology development and implementation, African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 7:5, 364-370. DOI: 10.1080/20421338.2015.1085176

¹¹ Muhammad Sabri. (2024). "Jurnal Manajemen dan Budaya: Studi Kasus pada Pondok Pesantren As-Sunah Lombok Studi di Desa Didiri Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso." Jurnal Manajemen dan Budaya, 4(1), 1-10. DOI: 10.51700/manajemen.v4i1

¹² Yiğit-Turan, B., Hellström-Reimer, M., Keravel, S., Leger-Smith, A., Lima, F., Ruiz Arana, U., & Benedetti, U. W. (2022). Landscape architecture criticism in the Anthropocene. *Journal of Landscape Architecture*, 17:3, 4-5. DOI: 10.1080/18626033.2022.2195222/<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/18626033.2022.2195222>

"pembangunan" merupakan inti dari banyak kampanye politik dan upaya propaganda yang bertujuan untuk menguasai fasilitas negara. Lalu, apa yang dimaksud dengan pembangunan ini? Pada dasarnya, pembangunan dapat didefinisikan sebagai inisiatif untuk membuat kehidupan bangsa dan masyarakatnya menjadi lebih baik dengan membangun infrastruktur dan fasilitas baru atau merenovasi yang sudah ada untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah, yang bertindak sebagai agen pembangunan, membutuhkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk membangun atau mengembangkan infrastruktur dan fasilitas. Masalahnya adalah tidak semua sumber daya alam dapat diperbaharui atau abadi. Alam bukanlah sebuah pabrik yang memproduksi barang setiap saat.

Pembangunan selalu dibingkai oleh pembagian dan penugasan otoritas tentang hasil yang dicapai. Pembangunan idealnya adalah untuk semua warga negara, tidak diragukan lagi. Namun, karena pengaruh terhadap hasil pembangunan juga tidak merata, maka sangat sulit untuk membagi dan mengalokasikan keuntungan pembangunan secara adil. Pada kenyataannya, keuntungan dari kemajuan terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil individu yang memiliki pengaruh finansial dan politik di pusat-pusat kekuasaan. Pembangunan hanya menjadi media pertukaran kekuasaan antara investor dan elit politik lokal. Kecenderungan ini terjadi karena para investor menekan pemerintah untuk menggunakan sumber daya alam strategis dan menekankan pembangunan jangka pendek. Hal ini bertentangan dengan cita-cita dan tujuan nasional dan pemerintah.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan menjanjikan secara ekonomi. Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) telah diprakarsai oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal. Namun, inisiatif pembangunan IKN ini sangat penting untuk menerapkan konsep Berkelanjutan dalam rangka menjawab tantangan perubahan iklim dan ketahanan lingkungan. Dalam pengembangan IKN, gagasan keberlanjutan mempertimbangkan faktor sosial, lingkungan, dan ekonomi yang berkelanjutan selain pertumbuhan ekonomi. Pertama dan terutama, ketika merancang IKN Indonesia, komponen lingkungan dari keberlanjutan harus menjadi prioritas utama. Penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan mitigasi dampak lingkungan yang merugikan merupakan pertimbangan penting dalam proses pembangunan ini. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan

Kedua, gagasan keberlanjutan IKN juga perlu mempertimbangkan faktor sosial. Penduduk lokal harus menerima manfaat yang adil dari pengembangan IKN Nusantara, dan kualitas biologis mereka harus ditingkatkan. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan lapangan kerja yang adil dan terhormat, memberikan pelatihan keterampilan kepada penduduk setempat, dan membangun infrastruktur sosial seperti bangunan umum seperti sekolah dan rumah sakit. Selain itu, untuk menjamin bahwa kepentingan dan tujuan masyarakat terpenuhi, ada kebutuhan untuk meningkatkan diskusi, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengembangan IKN.

Terakhir, ide keberlanjutan IKN perlu berpusat pada elemen-elemen ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, pembangunan ini harus mengurangi ketimpangan ekonomi regional dan membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga dapat dicapai dengan meningkatkan investasi di industri yang ramah lingkungan dan mutakhir, seperti teknologi bersih dan sektor hijau.

Pemerintah harus fokus pada komponen sosial dari pembangunan IKN selain komponen spasial. Seperti yang telah diketahui, lokasi IKN telah ditempati. Pembagian manfaat dapat memungkinkan masyarakat yang terkena dampak - yang masih tertinggal dalam hal ekonomi, pendidikan, dan kesehatan - untuk berpartisipasi dalam pembangunan, alih-alih dikucilkan dan dipaksa pindah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan diri dengan matang untuk menghindari perbedaan status kesehatan, pendidikan, dan ekonomi antara penduduk lokal dan penduduk IKN di masa depan. Pilar-pilar SDGs dapat digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia ikut serta dalam konsep pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan IKN. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau

disingkat SDGs, adalah akronim dari tujuan pembangunan berkelanjutan. sebuah inisiatif dunia untuk pembangunan berkelanjutan. Salah satu negara yang ikut serta dalam program ini adalah Indonesia. Negara-negara anggota PBB menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai upaya bersama untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kehidupan yang lebih baik pada tahun 2030. Prinsip-prinsip SDGs yang universal dan mencakup semua orang menjamin bahwa "tidak ada seorang pun yang tertinggal," seperti yang dinyatakan di halaman SDGs Bappenas. Kesepakatan global sebelumnya, yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Milenium, atau MDGs, memunculkan SDGs. Selain itu, pada bulan September 2015,

Terdapat beberapa pilar pada SDGs yg meliputi berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungannya. Masing-masing pilar SDG memiliki sejumlah target yg khusus buat dicapai. Tujuh belas pilar SDGs itu diantaranya.

a. Pengentasan Kemiskinan

Pilar ini bertujuan buat mengakhiri kemiskina dalam seluruh bentuk dan pada seluruh daerah. Pilar ini berupaya buat memastikan semua orang mempunyai akses terhadap baku hayati yg layak meliputi pangan, air higienis, perumahan dan pendidikan.

b. Pengentasan Kelaparan

Pilar ini memiliki penekanan di pemberantasan kelaparan, pencapaian ketahanan pangan, menaikkan produktivitas pertanian, dan mendukung sistem pertanian yang berkelanjutan.

c. Kehidupan yg Sehat serta Sejahtera

Pilar ini menargetkan buat kepastian kesehatan yang baik serta kesejahteraan bagi seluruh orang di seluruh usia. Aspek ini meliputi upaya buat mengurangi angka kematian bayi serta bunda, mengatasi penyakit menular serta tidak menular, dan menaikkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang standar.

d. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Pilar ini menekankan pentingnya kemitraan buat mencapai tujuan yg berkelanjutan. Implementasi SDGs kini telah mulai diterapkan di beberapa komunitas. Mulai asal perusahaan, instansi pemerintah, NGO, sampai beberapa proyek yg sedang atau akan berlangsung. keliru satu proyek yg juga menerapkan SDGs artinya proyek pembangunan ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ketua Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan, pada pembangunan IKN, pihaknya sangat menyampaikan perhatian akan aspek SDGs. Bambang ingin membuahakan IKN Nusantara menjadi *sustainable* dan *liveable city* (kota berkelanjutan dan layak huni). Salah Satu model penerapan SDGs pada proyek IKN merupakan program Persemaian Mentawir. Proyek Persemaian Mentawir ini mempunyai tujuan reforestasi serta pertanian hidroponik untuk masyarakat yang juga sebagai dukungan terhadap ekonomi berkelanjutan. Persemaian ini diproyeksi akan bisa memproduksi bibit menggunakan kapasitas 15 juta setahun. Pada kesempatan lain, Staf spesifik Bidang Pembangunan Berkelanjutan Otorita IKN Ibu Diani Sadiawati mengatakan waktu ini Otorita IKN telah menciptakan berbagai proyek yg mengadopsi pilar-pilar SDGs. Melalui *groundbreaking* Nusantara termin tiga, rencananya akan lebih banyak proyek yang berkelanjutan atau proyek hijau.¹³

Adalah tugas dan tanggung jawab setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam rangka menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan dasar dari partisipasi masyarakat dalam lembaga-lembaga demokrasi adalah untuk: (1) mencegah para pemimpin menyalahgunakan kekuasaan mereka; (2) mengkomunikasikan tujuan-tujuan masyarakat kepada pemerintah; (3) melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik; dan (4) menegakkan kedaulatan rakyat. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 96 Undang-Undang tersebut mengamanatkan agar pembuat undang-undang mengikutsertakan masyarakat dalam pekerjaan

¹³ Implementasi Pilar SDGs Dalam Pembangunan IKN. (n.d.). Pajakku.com. Retrieved May 15, 2024, from <https://www.pajakku.com/read/f078aa81-858f-4699-ad35-3804d98e2390/Implementasi-Pilar-SDGs-Dalam-Pembangunan-IKN>

mereka. Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik sebagai sarana untuk mengekspresikan tujuan mereka. Tujuan dari keterlibatan ini adalah untuk menjamin bahwa tujuan masyarakat tercermin dalam setiap kebijakan yang dibuat.

1. Masyarakat memiliki hak untuk berkomentar, baik secara tertulis maupun lisan, ketika undang-undang dan peraturan dibuat.
2. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan masukan secara tertulis dan/atau lisan adalah sebagai berikut: a. dengar pendapat; b. kunjungan ke tempat kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. ceramah, seminar, dan/atau lokakarya.
3. Seseorang atau sekelompok orang yang berkepentingan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai masyarakat.
4. Akses publik terhadap setiap rancangan peraturan perundang-undangan diperlukan agar masyarakat dapat memberikan tanggapan secara lisan dan/atau tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk menyampaikan tanggapan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁴

RUU IKN yang telah disahkan oleh Pemerintah dan DPR dalam proses pembahasannya ternyata tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang digariskan dalam UU tersebut. Terbukti bahwa RUU IKN mendapat tentangan keras dari masyarakat umum dan kecaman dari para penguasa dan pejabat tinggi. Pada kenyataannya, Kalimantan Timur mengajukan beberapa penolakan, menurut Hidayat NW (2022). Dengan bersatu menentang UU IKN, masyarakat Kalimantan Timur telah membentuk koalisi di dalam provinsi IKN di masa depan. Walhi Kaltim, LBH Samarinda, dan Jatam Kaltim membentuk koalisi tersebut. Mereka tidak menyetujui RUU tersebut.

SIMPULAN

Setelah sebelumnya dipegang oleh wilayah DKI Jakarta, pemerintah Indonesia secara resmi memindahkan posisi Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Kalimantan Timur, yang sering dikenal dengan sebutan "Nusantara". Pindahan ibu kota Indonesia ini telah menarik banyak perhatian. Pro dan kontra pemindahan IKN telah dibahas di berbagai kalangan. Topik-topik yang menjadi perbincangan antara lain lokasi IKN, undang-undang yang disahkan secara tergesa-gesa, dan masih banyak lagi.

Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan dinilai telah tak layak untuk terus menjadi pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. Mulai dari masalah lingkungan yang kian memburuk, kepadatan penduduk yang melebihi kapasitas yang dapat ditangani. Kondisi objektif Jakarta yang tak lagi cocok sebagai Ibu Kota Negara dapat dinilai melalui fakta dari "beban" yang ditanggung Jakarta, yang diantaranya adalah Kepadatan penduduk, Kemacetan Jakarta, dan Permasalahan lingkungan dan geologi yang akut.

IKN perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, khususnya di kawasan timur Indonesia. Pada periode ini, Jakarta dan daerah sekitarnya dianggap sebagai pusat dari semua kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat (politik, bisnis, perdagangan, investasi, teknologi, budaya, dan lain-lain). Dengan informasi ini, tidak mengherankan jika 70% dari 664 meter persegi wilayah Jakarta digunakan untuk perputaran uang. 01 km², atau 0,0003 persen, dari total luas daratan Indonesia yang mencapai 1.919.440 km². Pada tahun 2020, ada 10,56 juta orang yang tinggal di Jakarta, atau 3,9% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 270,20 juta jiwa. Karena masalah-masalah tersebut, pemerintah ingin memindahkan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan untuk memperbaiki lokasi dan menciptakan distribusi pembangunan yang lebih merata. Pengambilan keputusan oleh pemerintah harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam tiap prosesnya, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13

¹⁴ Pasal 96 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tahun 2022, yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pasal 96. Dalam konteks tata ruang dalam pembangunan kota, partisipasi masyarakat merupakan peran yang penting.

Sustainable Development Goals (SDG) atau dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan merupakan suatu bentuk program pembangunan berskala global. Indonesia merupakan salah satu negara yang berpartisipasi dalam program yang dibuat oleh negara-negara anggota PBB ini. SDG dicetuskan oleh anggota-anggota PBB sebagai gerakan kolektif untuk menjamin kehidupan yang lebih baik bagi semua orang pada tahun 2030. SDG merupakan evolusi dari perjanjian global sebelumnya yaitu MDGs atau Millennium Development Goals. Terdapat 17 pilar yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungannya, diantaranya adalah;

- 1) Pengentasan Kemiskinan (*no poverty*)
Pilar yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam seluruh bentuk dan menyebar ke setiap daerah. Pilar ini sebagai dasar untuk memastikan bahwa semua orang mempunyai akses terhadap baku hayati yang layak meliputi pangan, air higienis, perumahan, dan pendidikan.
- 2) Pengentasan Kelaparan
Pilar ini berkaitan dengan pemberantasan kelaparan, pencapaian ketahanan pangan, menaikkan produktivitas pertanian, dan mendukung sistem pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Kehidupan Yang Sehat Dan Sejahtera (*zero hunger*)
Pilar ini menargetkan buat kepastian kesehatan yang baik serta kesejahteraan bagi seluruh orang dan seluruh usia. Aspek ini meliputi upaya mengurangi angka kematian, mengatasi penyebaran penyakit menular dan tidak menular, serta menaikkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang menyeluruh.
- 4) Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan
Pilar ini menekankan pentingnya kemitraan buat mencapai tujuan yang berkelanjutan, kolaborasi yang melibatkan unsur-unsur masyarakat, mulai dari perusahaan, instansi pemerintah, NGO, hingga komunitas masyarakat.

Partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar menjadi pengamat, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam mengambil keputusan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program atau kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Dengan adanya partisipasi yang kuat dan berkelanjutan, masyarakat dapat merasa memiliki tanggung jawab dan keterlibatan yang lebih besar terhadap masa depan mereka sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan berbagai *stakeholder* lainnya untuk terus mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam berbagai ranah kehidupan, mulai dari pembangunan ekonomi, lingkungan, pendidikan, hingga kebijakan sosial. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan memiliki daya saing.

REFERENSI

- Daryono, B. S. (2022). *Pembangunan Berkelanjutan Di Ibu Kota Negara Nusantara Perspektif Biologi*. UGM Press.
- Heliarta. (2010). *Pembangunan Nasional* (Digital 2019 ed.). ALPRIN.
- Sugiyono, P. D. (2010). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. ALFABETA.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Armansyah, R., Muhamad Auza Syam, & Nabila Azahra. (2024). Peran Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota Sustainable Cities Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1), 255–266. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.879>

- Chandra Adjie Prianggodo. (2023). PEMBANGUNAN IKN SEBAGAI MERCUSUAR STRATEGIS (KAJIAN KRITIS DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2898>
- Ella Lesmanawaty' Wargadinata. (2021). HUBUNGAN DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN PROGRAM SMART-KAMPUNG KABUPATEN BANYUWANGI. *Jurnal Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 47–64. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1449>
- Faustina, R., Bayu, A., Batari, C., & Darto Miradhia. (2023, June 15). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA (IKN). ResearchGate; unknown.
https://www.researchgate.net/publication/371575487_PARTISIPASI_MASYARAKAT_DALAM_PERENCANAAN_PEMBANGUNAN_IBU_KOTA_NEGARA_IKN
- Frans Yudistira Sembiring. (2022). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA. *LEX PRIVATUM*, 11(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47766>
- Landscape architecture criticism in the Anthropocene. (2022). *Journal of Landscape Architecture*. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/18626033.2022.2195222>
- None Yanti Fristikawati, None Rainer Alvander, & None Verrence Wibowo. (2022). PENGATURAN DAN PENERAPAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT PADA PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA NUSANTARA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 739–749. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51859>
- Reshinta, E., None Sucahyanto, & Ode Sofyan Hardi. (2023). Analisis Kapasitas Jalan Dalam Menentukan Jalur Alternatif di Area Persimpangan Jalan Joglo Baru, Kembangan, Jakarta Barat. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota (Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, 18(2), 1–9. <https://doi.org/10.29313/jpwk.v18i2.2585>
- Rizkiana Sidqiyatul Hamdani. (2020). Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. *Journal of Regional and Rural*